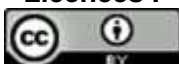


**Website:**<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH>**Permalink:**DOI: [10.32493/jamh.v4i1.36083](https://doi.org/10.32493/jamh.v4i1.36083)**Licences :**<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ISSN (online) : 2686-5858

ISSN (print) : 2686-1712

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : humanis.unpam@gmail.comArticle info : *Received:* Mei 2023 ; *Revised:* Juli 2023 ; *Accepted:* September 2023

Mitigasi Risiko Bencana di Lombok Nusa Tenggara Barat

Disaster Mitigation Risk at Lombok Nusa Tenggara Barat

Sugiyanto¹; Hamsinah²; Umi Rusilowati³*Universitas Pamulang, Email : dosen00495@unpam.ac.id; dosen00691@unpam.ac.id; dosen00061@unpam.ac.id*

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menilai kesiapan penanganan bencana yang terjadi dalam upaya penanganan mitigasikan risiko. Metodologi untuk mengukur dalam mitigasi risiko bencana maka dilakukan survey dan kuesioner, kajian terhadap dokumen pedoman dan kebijakan yang relevan dengan sistem GRK terintegrasi, diperkuat dengan wawancara dengan pimpinan, secara Delphi Method untuk memperoleh kesepakatan usulan secara bertahap dalam Praktik GRK Terintegrasi. Hasil PKM siklus PDCA referensi Delphi Method didapatkan bahwa di kepulauan Lombok Sumatera barat berpotensi terjadinya bencana T. Sunami dan Gempa, Banjir maka perlunya penanganan dalam mitigasi risiko sedini mungkin dengan menerapkan *Early Warning System* (EWS).

Kata kunci: Mitigasi Risiko; Pemberdayaan Masyarakat; Penanggulangan Bencana

This Community Service (PkM) aims to assess the preparedness for disaster management efforts to mitigate risks. The methodology for measuring disaster risk mitigation involves surveys and questionnaires, a review of relevant guidelines and policies related to the integrated disaster risk management system, and interviews with leaders using the Delphi Method to obtain gradual consensus in the practice of Integrated Disaster Risk Management (IDRM). The results of the PkM cycle using the Delphi Method reference indicate the potential for Tsunami and Earthquake disasters in the West Sumatra Lombok Islands, as well as floods, highlighting the need for risk mitigation through the implementation of an Early Warning System (EWS).

Keywords: Risk Mitigation, Community Empowerment, Disaster Management

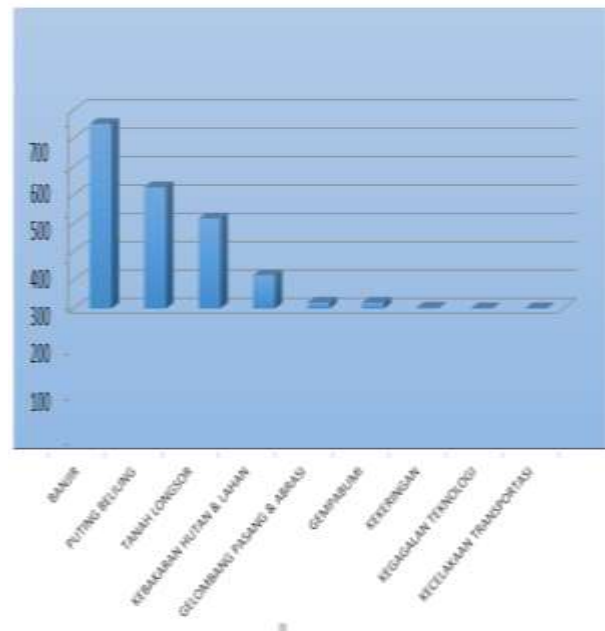
PENDAHULUAN

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2014-2018 program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia Berdasarkan data dari BNPB (2016-2021), Indonesia menduduki peringkat pertama untuk bencana tsunami dan tanah longsor dengan jumlah korban terbanyak dunia. Sudah banyak diketahui bahwa Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Industri 4.0 secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh dalam inovasi mitigasi riskmanajemen penanganan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dimana saat ini organisasi pemerintah dalam mitigasi risk manajemen penanganan bencana dihadapkan pada situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang mengantarkan organisasi publik dan privat di berbagai sektor, termasuk ofrganisasi yang menangani kebencanaan menghadapi dinamika yang sangat cepat.

Pendekatan GRK (Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan) terintegrasi. Pada tahun 2019, Open Compliance & Ethics Group (OCEG) melaksanakan survey tingkat Maturitas GRK (GRC Maturity Survey) yang menemukan bahwa bahwa 14% responden telah sepenuhnya atau secara substansial mengintegrasikan proses dan teknologi GRK, sementara 23% masih memiliki GRK yang bersifat silo, sedangkan sisanya belum memiliki tingkat maturitas GRK yang memadai. Hasil survey tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan GRK secara terintegrasi masih jarang ditemui walaupun diyakini bahwa penerapan GRK terintegrasi akan memberikan manfaat. Sejalan dengan situasi VUCA yang dihadapi berbagai organisasi di berbagai sektor, dalam menjalankan amanah Undang-Undang no. 1 tahun 2022 tentang keuangan daerah, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kompleksitas dan risiko yang dapat menghambat penanggulangan

bencana berbasis GRK (Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan) dengan dinamika dan kebutuhan yang mengemuka, maka dipandang perlu untuk memiliki mekanisme yang mampu mengintegrasikan praktik governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi praktik yang terjalin secara berkelindan dan sinergis. Dengan terintegrasinya Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRK) diharapkan pelaksanaan masing-masing komponen akan menjadi lebih efisien dan efektif serta mampu menunjang perkembangan Pengelola Keuangan Daerah Di Indonesia khususnya alokasi penanganan bencana di daerah.

Fakta kejadian bencana di indonesia tahun 2020 kejadian bencana selama kurun waktu tahun 2020 telah terjadi 2.925 kejadian bencana alam yang didominasi bencana alam hidro meteorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan jumlah kejadian bencana di Indonesia sesuai data adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Kejadian Bencana Di Indonesia Periode 1 Januari – 15 Juli 2021

Gambar 1 diatas menunjukkan fakta kejadian bencana yang terdiri dari bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan & lahan, gelombang pasang & abrasi, gempa bumi, kekeringan, kegagalan teknologi, dan kecelakaan transportasi di Indonesia dari kejadian bencana periode 1 Januari – 15 Juli 2021.

Sebagai bagian dari jumlah kejadian bencana sesuai gambar tersebut diatas, maka perlu untuk mengkaji terlebih dahulu kesiapan Pemerintahan di Indonesia dalam menerapkan inovasi mitigasikan GRK terintegrasi. Dengan pengkajian yang dilakukan diharapkan dapat menggambarkan gap yang teridentifikasi dalam pelaksanaan GRK saat ini di Pemerintahan di Indonesia khususnya dalam penanganan bencana sehingga bisa merumuskan formula yang tepat untuk menunjang penerapan GRK terintegrasi dalam penanganan bencana di Indonesia. GRK terintegrasi, GRC merupakan akronim dari Governance, Risk, dan Compliance yang kemudian diadopsi menjadi akronim GRK (Governansi, Risiko, dan Kepatuhan) di Indonesia. Istilah Governansi digunakan untuk menggantikan istilah tata kelola untuk mengakomodasi lingkup yang lebih luas. Komite Nasional Kebijakan Governance – KNKG (2019) menyatakan bahwa istilah tata kelola memiliki makna yang lebih sempit dimana hanya mengatur hubungan antar pihak internal di organisasi. Sementara itu, istilah governansi merujuk pada pengaturan terhadap berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas (internal dan eksternal). Secara konsep, gagasan mengenai GRK pertama diusulkan pada tahun 2003 oleh Open Compliance and Ethic Group (OCEG). Berdasarkan definisi yang dikeluarkan OCEG, tujuan dari penerapan GRK terintegrasi adalah tercapainya kinerja berprinsip melalui penanganan ketidakpastian dan tindakan penuh integritas yang menjadi landasan organisasi mitigasi risiko bencana pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat penanganan bencana kepulauan Lombok Nusa Tenggara Barat.

Permasalahan mitra di Lombok Nusa Tenggara Barat khususnya permasalahan mitra sebagai berikut:

1. Kurangnya penanganan Risk Manajemen Dalam Penanganan Bencana
2. Belum terintegrasinya tata kelola Pemerintahan Berbasis Risk Manajemen Bencana
3. Kurangnya kepatuhan dalam penanganan Risk Manajemen Dalam Menangani Bencana
4. Kurangnya Integrasi Penerapan GRK (Governansi, Risk Management, Kepatuhan) Dalam Penanganan Bencana
5. Belum Adanya Pelaksanaan Standarisasi penanganan Risk Manajemen Berbasis Bencana.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling rawan terhadap bencana. Oleh karenanya, manajemen risiko bencana sangatlah penting bagi Propinsi NTB untuk perencanaan penganggaran nasional dan daerah. Sebagai salah satu provinsi yang paling rawan bencana di Indonesia, manajemen risiko bencana sangat penting dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Gempa yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Lombok-NTB telah membentuk cara mitigasi untuk mengurangi dampak bencana alam dan dampak perubahan iklim. Sehingga dalam hal ini, Wagub juga menyampaikan tiga strategi tahapan manajemen risiko bencana di NTB. "Pada tahap "pre- bencana", kesiapan daerah dan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana alam. *Contingency* plan juga dikembangkan termasuk pemetaan ancaman bencana di setiap daerah dan memastikan sistem peringatan dini terlengkap melalui aplikasi siaga. Kemudian, pada tahap tanggap darurat, Pemprov juga menyiapkan bantuan darurat untuk didistribusikan untuk membuat rencana penanggulangan risiko bencana yang lebih efisien guna mengatasi tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir yang dilakukan dapat memberikan



pengetahuan dan pembelajaran dalam manajemen risiko bencana serta dapat memperkuat Kerjasama antara Universitas Pamulang dengan Universitas Muhammadiyah Lombok Mataram secara sustainable. Bersama dengan mitra-mitra dalam penganggulangi dan mitigasi risiko bencana.



Gambar 2: Mitra-Mitra Penanggulangan Bencana

Penanggulan bencana organisasi dihadapkan pada situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang mengantarkan organisasi di berbagai sektor menghadapi dinamika yang sangat cepat. Pendekatan GRK (Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan) terintegrasi diyakini dapat menjadi salah satu alat yang bisa menjaga organisasi untuk terus bertumbuh kembang dan berkelanjutan. Namun, seringkali organisasi sulit melakukan penerapan GRK secara terintegrasi. Seringkali, penerapan GRK di organisasi masih ditemukan bersifat silo yang tercermin dari adanya koordinasi yang lemah, adanya konflik kepentingan, ketidakjelasan akuntabilitas, adanya kesenjangan, dan inefisiensi biaya. Tentu saja hal ini menyebabkan penerapan GRK tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pada tahun 2019, Open Compliance & Ethics Group (OCEG) melaksanakan survey tingkat Maturitas GRK (GRC Maturity Survey) yang menemukan bahwa bahwa

14% responden telah sepenuhnya atau secara substansial mengintegrasikan proses dan teknologi GRK, sementara 23% masih memiliki GRK yang bersifat silo, sedangkan sisanya belum memiliki tingkat maturitas GRK yang memadai. Hasil survey tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan GRK secara terintegrasi masih jarang ditemui walaupun diyakini bahwa penerapan GRK terintegrasi akan memberikan manfaat. Sejalan dengan situasi VUCA yang dihadapi berbagai organisasi di berbagai sektor, juga menghadapi kompleksitas dan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan mitigasi risiko bencana. Namun, dengan dinamika dan kebutuhan yang mengemuka, maka dipandang perlu untuk memiliki mekanisme yang mampu mengintegrasikan praktik governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi praktik yang terjalin secara berkelindan dan sinergis. Dengan terintegrasinya Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRK) diharapkan pelaksanaan masing-masing komponen akan menjadi lebih efisien dan efektif serta mampu menunjang perkembangan pemerintahan di Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, maka perlu untuk mengkaji terlebih dahulu kesiapan dalam mengimplementasikan GRK terintegrasi. Dengan pengkajian yang dilakukan diharapkan dapat tergambar gap yang teridentifikasi dalam pelaksanaan GRK saat ini untuk menunjang penerapan GRK terintegrasi di Indonesia. GRK terintegrasi, GRC merupakan akronim dari Governance, Risk, dan Compliance yang kemudian diadopsi menjadi akronim GRK (Governansi, Risiko, dan Kepatuhan) di Indonesia. Istilah Governansi digunakan untuk menggantikan istilah tata kelola untuk mengakomodasi lingkup yang lebih luas. Komite Nasional Kebijakan Governance – KNKG (2019) menyatakan bahwa istilah tata kelola memiliki makna yang lebih sempit dimana hanya mengatur hubungan antar pihak internal di organisasi.

Sementara itu, istilah governansi merujuk pada pengaturan terhadap berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas (internal dan eksternal). Secara konsep, gagasan mengenai GRK pertama diusulkan pada tahun 2003 oleh Open Compliance and Ethic Group (OCEG). Berdasarkan definisi yang dikeluarkan OCEG, tujuan dari penerapan GRK terintegrasi adalah tercapainya kinerja berprinsip melalui penanganan ketidakpastian dan Tindakan penuh integritas yang menjadi landasan organisasi. Mitigasi Risiko Bencana melibatkan pencegahan bencana dan pengurangan dampak buruk bencana pada tahap minimal. Kebijakan mitigasi adalah kebijakan jangka panjang dapat bersifat struktural maupun non struktural. Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, sedangkan kebijakan non-struktural meliputi legislasi dan perencanaan wilayah. Misalnya kebijakan penetapan rencana umum tata ruang untuk mencegah banjir. Kesiapsiagaan (Preparedness) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Randolph Kent (1994) kesiapan bencana mencakup” peramalan dan pengambilan keputusan tindakan-tindakan pencegahan sebelum munculnya ancaman”. Di dalamnya meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, gejala awal bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan dini, rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama periode waspada untuk meminimalisir kematian dan kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna terutama mitigasi bencana melalui Inovasi Mitigasi Bencana.

Solusi Pengabdian kepada Masyarakat .

Proses mitigasi melibatkan pencegahan bencana dan pengurangan dampak buruk bencana pada tahap minimal. Kebijakan mitigasi adalah kebijakan jangka

panjang dapat bersifat struktural maupun non struktural. Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, sedangkan kebijakan non-struktural meliputi legislasi dan perencanaan wilayah. Misalnya kebijakan penetapan rencana umum tata ruang untuk mencegah banjir. Kesiapsiagaan (Preparedness) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Randolph Kent (1994) kesiapan bencana mencakup” peramalan dan pengambilan keputusan tindakan-tindakan pencegahan sebelum munculnya ancaman”. Di dalamnya meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, gejala awal bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan dini, rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama periode waspada untuk meminimalisir kematian dan kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Teori Built back better merupakan teori kesiapsiagaan (Preparedness) dan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna terutama mitigasi bencana melalui Inovasi Mitigasi Bencana. Usaha inovasi mitigasi bencana dapat berupa prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana berupa kesiapsiagaan atau upaya memberikan pemahaman pada penduduk untuk mengantisipasi bencana, melalui pemberian informasi, peningkatan kesiagaan jika terjadi bencana terdapat langkah-langkah untuk memperkecil resiko bencana. Pada saat kejadian berupa tanggap darurat yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, evakuasi, dan penguangsan. Pascabencana berupa pemulihan rehabilitasi dan pembangunan. Proses komunikasi penanggulangan bencana diawali dengan penyampaian pesan-pesan kebijakan penanggulangan bencana pemerintah melalui BNPB.



Secara struktural, kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada BPBD Provinsi hingga BPBD kabupaten atau kota. Selain itu penyampaian pesan-pesan kebijakan juga disampaikan oleh Dinas terkait untuk melihat bagaimana program yang sudah dilakukan oleh kedua kebijakan yang dilakukan oleh BPBD provinsi dan Dinas terkait dalam melakukan mitigasi pengurangan resiko bencana melalui inovasi mitigasi bencana berbasis GRK. Kerangka Pengurangan Bencana Dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini merujuk kepada SENDAI Framework 2015-2030. SENDAI Framework adalah kelanjutan dari Kerangka Hyogo, jika pada awalnya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) merujuk ke disaster management saat ini kerangka berubah menjadi disaster risk management. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDDR).

Praktiknya, organisasi seringkali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan konsep GRK. Seringkali organisasi memiliki berbagai macam referensi sistem/panduan/pedoman (yang bisa jadi merupakan suatu tuntutan regulasi). Untuk itu, pengintegrasian GRK harus didasari oleh semangat bahwa dengan sistem GRK yang terintegrasi akan

memberikan nilai tambah bagi organisasi dimana sistem/panduan/pedoman dapat lebih efektif dan efisien.

Salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi rujukan pengintegrasian sistem GRK adalah pengintegrasian berbasis ISO (International Organization for Standardization). Dalam konteks penerapan GRK. ISO telah merilis ISO 37000/DIS, ISO 31000:2018 Risk Management Principles and Guidelines, dan ISO 37301: Compliance Management System. Meskipun dapat digunakan secara mandiri dan terpisah, namun ketiga rujukan ISO dalam lingkup GRK tersebut pada dasarnya saling kompatibel dan karenanya menjadi acuan yang kohesif untuk mengimplementasikan GRK terintegrasi (Alijoyo, 2021). Standar lingkup GRK berbasis ISO tersebut kompatibel karena masing-masing standar atau pedoman memiliki struktur generik yang serupa berdasarkan siklus empat fase PDCA (Plan-Do-Check-Act). Alijoyo (2021) melakukan pengintegrasian standar GRK berbasis ISO yang ditunjukkan pada gambar berikut:

	MANAGEMENT SYSTEM STANDARD	PHASE I: PLAN				MANAGEMENT SYSTEM STANDARD	PHASE II: DO				MANAGEMENT SYSTEM STANDARD	PHASE III: CHECK				MANAGEMENT SYSTEM STANDARD	PHASE IV: ACT			
		ISO/DIS 37000	ISO 31000	ISO 37301			ISO/DIS 37000	ISO 31000	ISO 37301			ISO/DIS 37000	ISO 31000	ISO 37301						
	1. INTEGRATED MANAGEMENT POLICY					3. SUPPORT & OPERATION					4. MONITORING & REVIEW					5. IMPROVEMENT				
	Management system, policy, and Management commitment & leadership	4.2 7.7	5 5.2 5.3 5.4.2	4.4 5.1 5.2 5.3		3.1. Resources (personnel, infrastructure, cost)	5 5.1	5.4.4 7.1	7.1 7.2	PHASE III: CHECK	4.1. Performance monitoring and measurement of process and procedures.	7.4	5.6 6.6	9.1		5.1. Improvement Plan	7.3.3 7.11	5.7	10.1	
	2. PLANNING					3.2. Competencies, awareness, training.	5.2	4 5.4.4	7.2 7.2.3 7.3			4.2. Audit of non-compliance, non-conformities, and investigation	7.4.3	5.6	8.3 8.4 9.2		5.2. Corrective actions, adaptation, and improvement.	7.11.3	5.7.1 5.7.2	10.2
	2.1. Organizational context, stakeholders needs & expectation	4.1 4.3	5.4.1 6.3 6.3.3	4.1 4.2 4.3 4.5		3.3. Communication, coordination, and cooperation.	7.5	5.4.5 6.2	7.4			4.3. Management review	7.4.3	5.4.2 5.6	9.3.2 9.3.3					
	2.2. Objectives and targets setting	7.1 7.2	5.5 6.4	4.5 6.2		3.4. Documented information	7.8	6.7	7.5			4.4. Recording & reporting	7.5.3	6.7	9.1.5					
	2.3. Risk assessment	7.3.3	6.4	4.6		3.5. Control of documents		6.7	7.5.3		PHASE IV: ACT									
	2.4. Programs to address risk and opportunities that affect objectives/targets:	7.3	5.5 6.5	6.1		3.5. Operational planning, execution and control of operation risks.	7.9	6.5.2 6.5.3	8.1											
	2.5. Internal control plan to address operation risk	7.3	6.5.2 6.5.3	8.1 8.2		3.6. Operationalization of contingency plan.	7.4 7.4.3	6.5.3	8.1 8.4											
	2.6. Emergency/contingency plan	7.4 7.4.3	6.5.3	8.1 8.4																

Gambar 3. Integrasi GRK berbasis Standar ISO

Berdasarkan gambar, dapat ditunjukkan bahwa klausa yang ada pada Standar ISO 37000/DIS sebagai rujukan penerapan governansi organisasi, ISO 31000 sebagai rujukan penerapan manajemen risiko organisasi, dan ISO 37301 sebagai rujukan penerapan manajemen kepatuhan organisasi saling berhubungan dan karenanya mendukung integrasi GRK. Hal tersebut juga dapat membantu organisasi untuk memilih opsi untuk memulai dengan standar/pedoman ISO untuk lingkup GRK tertentu dan kemudian mulai mengintegrasikan dengan standar/pedoman ISO untuk lingkup GRK lainnya. Penggunaan sistem GRK terintegrasi berbasis ISO akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi diantaranya (Alijoyo, 2021): Membantu organisasi memberikan kejelasan tentang hubungan kerja antara fungsi governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga praktik GRK terintegrasi semakin efektif dan efisien; Setiap standar/pedoman berbasis ISO dapat diimplementasikan sebagai sistem manajemen maka dapat diukur, ditentukan, dilacak, dan diaudit secara parsial. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk memilih cara masuk yang paling efektif dan efisien menuju GRK yang terintegrasi; Setiap standar/pedoman berbasis ISO diakui dengan baik sebagai referensi internasional dibandingkan dengan referensi khusus negara/regulasi. Hal ini akan memungkinkan organisasi mengomunikasikan praktik GRK terintegrasi dengan cara yang lebih mudah kepada semua pihak yang berkepentingan, baik karyawan internal atau rekanan dari belahan dunia mana pun. Dalam membangun kompetensi manusia, mudah bagi organisasi untuk mencari mitra pelatihan dan pengembangan karena ada banyak penyedia yang menawarkan layanan pelatihan terkait ISO. Dalam memperoleh jaminan independen, mudah bagi organisasi untuk melibatkan auditor ISO dan konsultan independen baik untuk tujuan sertifikasi atau untuk tujuan internal. penerapan governansi organisasi, ISO 31000 sebagai rujukan penerapan manajemen risiko organisasi, dan

ISO 37301 sebagai rujukan penerapan manajemen kepatuhan organisasi saling berhubungan dan karenanya mendukung integrasi GRK. Hal tersebut juga dapat membantu organisasi untuk memilih opsi untuk memulai dengan standar/pedoman ISO untuk lingkup GRK tertentu dan kemudian mulai mengintegrasikan dengan standar/pedoman ISO untuk lingkup GRK. ISO terus memperbarui standar/pedoman mereka secara teratur. Oleh karena itu, pengguna ISO dapat memiliki jaminan bahwa referensi mereka (dalam hal ini lingkup GRK) selalu mutakhir, kontekstual, dan relevan dari waktu ke waktu. Terdapat banyak pengadopsi seri berbasis ISO di dunia, jauh lebih mudah dan praktis bagi organisasi untuk melakukan benchmark baik untuk mendapatkan kurva pembelajaran yang lebih cepat atau untuk memperkaya perbaikan berkelanjutan.. Dalam konteks penerapan GRK. ISO telah merilis ISO 37000/DIS, ISO 31000:2018 Risk Management Principles and Guidelines, dan ISO 37301: Compliance Management System. Meskipun dapat digunakan secara mandiri dan terpisah, namun ketiga rujukan ISO dalam lingkup GRK tersebut pada dasarnya saling kompatibel dan karenanya menjadi acuan yang kohesif untuk mengimplementasikan GRK terintegrasi (Alijoyo, 2021). Standar lingkup GRK berbasis ISO tersebut kompatibel karena masing-masing standar atau pedoman memiliki struktur generik yang serupa berdasarkan siklus empat fase PDCA (Plan-Do-Check-Act

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat yang Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat Bersama Universitas Pamulang dengan Universitas Muhammadiyah Mataran dengan tema Mitigasi Risiko Bencana Kepulauan Lombok Nusa Tenggara Barat di Desa Selebung, Kec Batukliang, Kab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dihadiri oleh



peserta karyawan Travel Lombok Kita, Aparatur Desa Wisata Selebung, dan Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram. untuk mencapai sasaran menetapkan beberapa tahapan yaitu:

Tahap 1: Analisis Kesenjangan Praktik GRK Terintegrasi

Pada tahap 1 dilakukan analisis kesenjangan terhadap praktik GRK terintegrasi.

Tahap 1: Analisis Kesenjangan Praktik GRK Terintegrasi

Pada tahap 1 dilakukan analisis kesenjangan diperoleh melalui: Tinjauan dokumen untuk menilai kesiapan dokumen pedoman/manual GRK terintegrasi. Adapun kerangka tinjauan dokumen sistem GRK terintegrasi dilakukan melalui kerangka sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Tinjauan Dokumen

Peninjauan terhadap dokumen-dokumen (Kebijakan, Pedoman, SOP, Instruksi Kerja, dan dokumen lainnya yang relevan) yang berkaitan dengan penerapan GRK terintegrasi dibagi kedalam empat fase penerapan GRK terintegrasi yaitu plan-do-check-act. Kuesioner persepsi untuk menilaikesiapan mitra dalam penerapan GRK terintegrasi. Kuesioner diberikan kepada seluruh dengan 30 pertanyaan untuk mendapatkan informasi persepsi perihal praktik GRK terintegrasi. Struktur kuesioner terdiri dari beberapa topik pertanyaan yang menyangkut:

Tahap 2: Penerapan Green GRK Terintegrasi

Struktur Pertanyaan Kuesioner GRK Terintegrasi ISO 31000-2018

Wawancara dengan pimpinan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan dan komitmen pimpinan terhadap penerapan GRK terintegrasi. Setelah dokumen terkumpul, data kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan 4 phase:

Phase 1: Plan	Phase 2: Do	Phase 3: Check	Phase 4: Act
Integrated Management System, Policy, and Management Leadership & Commitment Planning	Support Operation	Monitoring and Review	Improvement
2 Testing aspect 14 Indicator 27 Parameter	2 Testing aspect 14 Indicator 34 Parameter	1 Testing aspect 4 Indicator 18 Parameter	1 Testing aspect 2 Indicator 5 Parameter

Gambar 5 Tahap nalisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana alam yang terjadi dapat dimitigasi risiko sedini mungkin dengan cara dikelola dengan baik sehingga sering terjadi kerugian. Oleh sebab itu, pengelolaan BNPB menjadi tidak efektif dan efisien dan terkadang muncul kejadian yang terjadi. Tujuan dari pengelolaan yang tepat adalah untuk meminimalisir biaya-biaya operasional seminimal mungkin sehingga akan mengoptimalkan kinerja koperasi dalam melaksanakan pengendalian persediaan yang dapat diandalkan dan dipercaya tersebut maka harus diperhatikan berbagai faktor yang terkait dengan persediaan artinya penentuan dan pengelompokan biaya-biaya yang terkait dengan persediaan perlu mendapatkan perhatian yang khusus

dari pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat.

Hasil Pembahasan Penelitian:

1. Berdasarkan Metode phenomenological research dimana metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan pada kondisi objek.

Berdasarkan hasil tinjauan dokumen yang tersedia yaitu:

1. BNPB Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BNPB;
2. BNPB tentang Pedoman Operasi Baku Program Kepatuhan.
3. BNPB tentang Pedoman Manajemen Risiko Korporasi;

Diperoleh hasil Hasil Tinjauan Dokumen GRK Terintegrasi sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Tinjauan Dokumen GRK Terintegrasi

Phase	Jumlah	Kriteria Terpenuhi	Semua Terpenuhi	Sebagian Tidak Terpenuhi
<i>Plan</i>	27	0	0	27
<i>Do</i>	34	0	0	34
<i>Check</i>	18	0	0	18
<i>Act</i>	5	0	0	5

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil tinjauan dokumen sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa:

1. 1)Berbagai peraturan di BNPB tentang penerapan Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (G/R/K) saat ini, belum memberikan payung kebijakan bagi praktik GRK yang terintegrasi sesuai kriteria ISO Handbook Integrated Use of Management System Standard, dalam hal ini yang mencakup standar ISO/DIS 37000 (Governansi Organisasi), ISO 31000 (Manajemen Risiko), dan ISO 37301 (Manajemen Kepatuhan);
2. 2)Mengingat analisis hanya dilakukan terhadap dokumen yang berisikan peraturan tentang penerapan Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (G/R/K), maka tidak tertutup kemungkinan terdapat praktik G/R/K yang terintegrasi di lapangan, yang berkembang dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan BNPB Karena itu, praktik-

praktik seperti ini ini perlu segera diberikan payung kebijakan agar pelaksanaannya memiliki legitimasi yang jelas serta lebih terkendali dan terukur.

Hasil Kuesioner Persepsi

Kuesioner diberikan kepada seluruh insan BNPB dan Mitra dengan 20 pertanyaan untuk mendapatkan informasi persepsi jajaran BNPB dan Mitra perihal praktik GRK terintegrasi. Adapun hasil dari pengumpulan kuesioner adalah sebagai berikut:

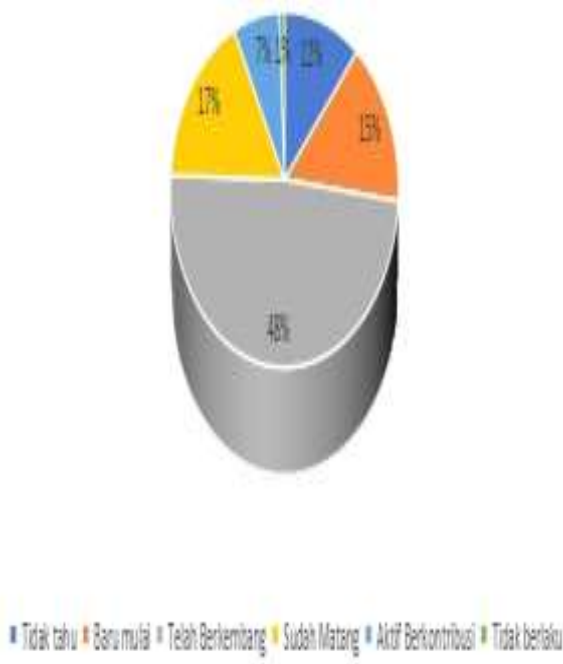
Tabel 2. Profil Responden

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas	17
2	Basarnas DIT Kesiapsiagaan	17
3	Bappeda Litbang	8
4	BPBD	15
5	Dinas Sosial dan Kesehatan	20
6	Pemerintahan	17
7	Polresta dan lainnya	30
TOTAL:		124

Sumber: Data diolah 2023

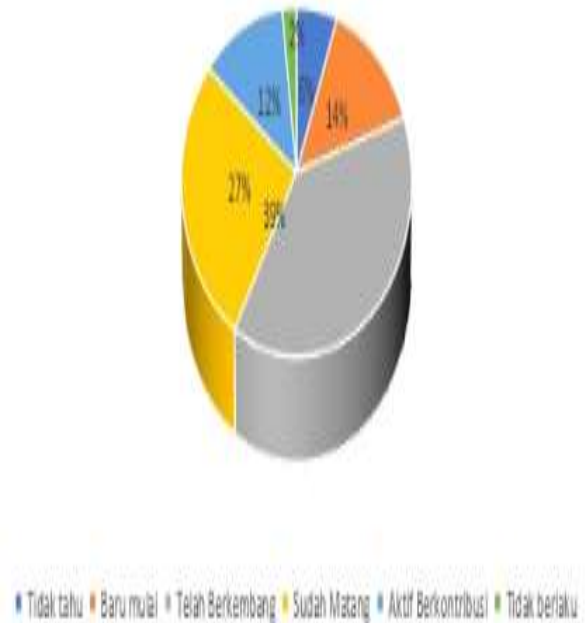
Terdapat 124 responden yang mengisi kuesioner dan menunjukkan bahwa 100% insan BNPB dan Mitra (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Basarnas DIT Kesiapsiagaan, Bappeda Litbang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Kesehatan, Pemerintahan Sumatera Barat, dan pemerintahan Lombok telah mengisi kuesioner.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa meski praktik GRK Terintegrasi diyakini telah berkembang dan matang, namun masih belum dapat memberi manfaat yang signifikan.



Gambar 6. Hasil Kuesioner – Aspek GRK Terintegrasi

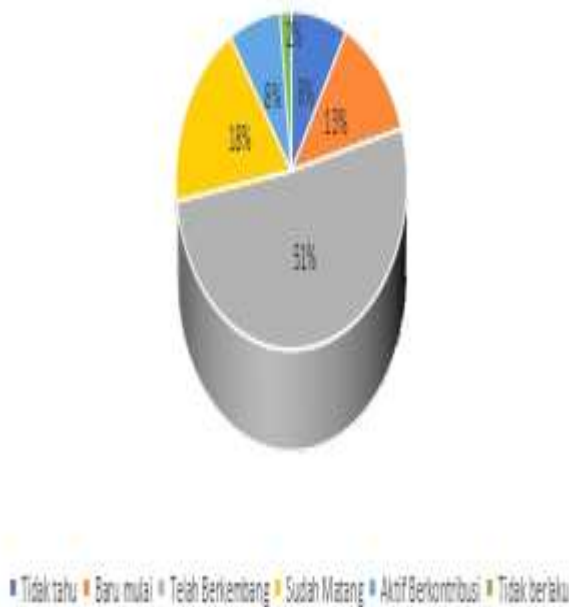
Berdasarkan gambar, Sebagian besar responden meyakini bahwa praktik GRK terintegrasi sudah berkembang dengan baik (48%) bahkan sudah matang (17%). Namun baru sebagian kecil responden (7%) yang mengakui GRK Terintegrasi telah aktif berkontribusi bagi penciptaan kinerja berprinsip di BPKH. Di lain pihak, masih cukup banyak responden (15%) yang menganggap praktik GRK Terintegrasi baru mulai berkembang bahkan banyak juga responden (12%) yang tidak mengetahui perihal GRK Terintegrasi di BNPB dan Mitra.



Gambar 7. Hasil Kuesioner – Aspek Governansi

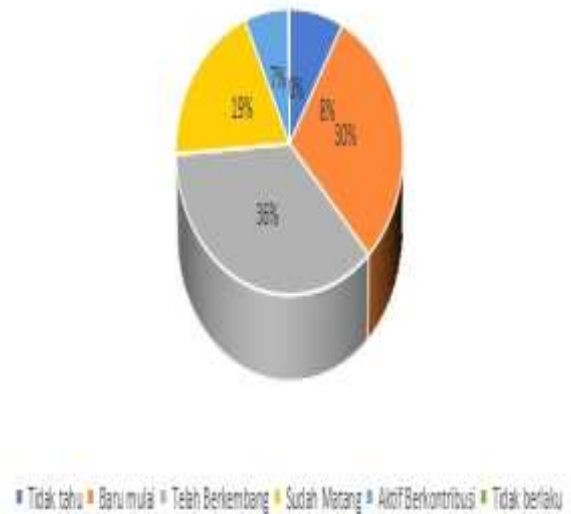
Berdasarkan gambar sebagian besar responden mempersepsikan bahwa praktik Governansi sudah berkembang dengan baik (39%) dan matang (27%). Kontribusi aktif praktik Governansi bagi penciptaan kinerja berprinsip masih belum signifikan, karena tidak banyak responden yang meyakini hal ini (12%). Di lain pihak, masih cukup banyak responden (14%) yang menganggap praktik Governansi baru mulai berkembang bahkan ada juga responden (6%) yang tidak mengetahui perihal praktik Governansi di BNPB dan Mitra Hal ini dapat disimpulkan bahwa meski praktik Governansi diyakini telah berkembang dan matang, namun

kemanfaatannya bagi penciptaan kinerja berprinsip masih perlu ditingkatkan lagi.



Gambar 8. Hasil Kuesioner – Aspek Manajemen Risiko

Berdasarkan gambar, sebagian besar responden meyakini bahwa praktik Manajemen Risiko sudah berkembang dengan baik (51%) bahkan sudah matang (18%). Namun, baru sebagian kecil responden (7%) yang mengakui Manajemen Risiko telah aktif berkontribusi bagi penciptaan kinerja berprinsip di BNPB dan Mitra. Selain pihak, masih cukup banyak responden (13%) yang menganggap praktik Manajemen Risiko baru mulai berkembang bahkan ada juga responden (8%) yang tidak mengetahui tentang praktik Manajemen Risiko di BNPB. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meski praktik Manajemen Risiko diyakini telah berkembang dan matang, namun masih belum memberikan manfaat yang signifikan bagi penciptaan kinerja berprinsip di BNPB dan Mitra.



Gambar 4. Hasil Kuesioner – Aspek Kepatuhan

Berdasarkan gambar, Sebagian besar responden meyakini bahwa praktik Manajemen Kepatuhan sudah berkembang dengan baik (36%) bahkan sudah matang (19%). Namun, baru sebagian kecil responden (7%) yang mengakui Manajemen Kepatuhan telah aktif berkontribusi bagi penciptaan kinerja berprinsip di BNPB dan Mitra. Di lain pihak, ada banyak juga responden (30%) yang menganggap praktik Manajemen Kepatuhan baru mulai berkembang, bahkan masih ada responden (8%) yang tidak mengetahui tentang praktik Manajemen Kepatuhan di BNPB dan Mitra. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada keraguan perihal perkembangan praktik Manajemen Kepatuhan di BNPB dan Mitra sehingga hal ini harus diperjelas lagi. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa praktik Manajemen Kepatuhan dianggap masih belum memberikan manfaat yang signifikan bagi penciptaan kinerja berprinsip di BNPB dan Mitra. Berdasarkan hasil kajian beberapa kesimpulan yang bisa diambil sebagai

berikut: Kajian ini memiliki keterbatasan dimana dalam lingkup pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pihak BNPB Lombok dan Mitra, tidak meliputi asesmen terhadap pemenuhan dan efektivitas implementasi G/R/K secara terpisah di BNPB dan Mitra saat ini. Lingkup pekerjaan kajian terbatas pada kesiapan BNPB Lombok dalam pengintegrasian GRK.

mekanisme pendistribusian dokumen dan informasi, serta mekanisme monitoring & review secara berkala yang memastikan adanya aktivitas peningkatan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis disimpulkan sebagai berikut:

Kesesuaian dokumen yang saat ini ada di BNPB dengan persyaratan klausul pengintegrasian GRK; serta

Kuesioner/wawancara persepsi pimpinan dan Relawan dan Mitra BNPB tentang pengintegrasian GRK. Beberapa asumsi dan limitasi dalam metode kerja perlu dibuat yang dapat berimplikasi pada kemungkinan hasil asesmen kesiapan belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas dan kendala pelaksanaan G/R/K yang saat ini ada di BNPB dan Mitra.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian lanjutan untuk menilai tingkat efektivitas penerapan GRK (baik secara terpisah maupun secara terintegrasi) dengan menggunakan pendekatan model maturitas (Maturity Assessment) untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan GRK terintegrasi di BNPB dan Mitra.

Saran

Terdapat environment yang memadai dalam pelaksanaan GRK terintegrasi di BNPB Lombok dan Mitra. Hal ini ditunjukkan dengan persepsi yang tinggi (umumnya menyatakan telah berkembang) atas berbagai aspek dalam bidang GRK yang saat ini ada di BNPB Lombok dan Mitra.

Perlu adanya langkah untuk peningkatan efektivitas penerapan GRK terintegrasi melalui adanya penetapan kejelasan akuntabilitas, penetapan sasaran, pembuatan pedoman dan manual, peningkatan infrastruktur dan sumber daya,



. DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, A. (2021, August 8). Integrated GRC using ISO-Based Series of Standards and/or Guidelines. Retrieved from CRMS:
- Febrianti, F. D., Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2020). Green Intellectual Capital Conservatism Earning Management, To Future Stock Return As Moderating Stock Return (Study Of Mining Companies In Indonesia Listed On Idx For The Period Of 2014-2019). *The Accounting Journal Of Binaniaga*, 5(2), 141-154.
- GRC Forum Indonesia. (2020). *Panduan Mencapai Model Keunggulan Governance, Risk, and Compliance (GRC)*.
- ISO. (2018). *ISO 31000 - Risk management — Guidelines*.
- ISO. (2018). *ISO Handbook The Integrated Use of Management System Standards (IUMSS)*.
- ISO. (2020). *ISO 37000/DIS - Guidance for the governance of organizations*.
- ISO. (2021). *ISO 37301 - Compliance management systems — Requirements with guidance for use*.
- KNKG. (2019). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia*.
- OCEG. (2019). *GRC Maturity Survey*.
- Rebelo, M. F., Santos, G., & Silva, R. (2015). Integration of standardized management systems: a dilemma. *Systems*, 3(2), 45-59.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyanto, S. (2022). The effect of the audit opinion, financial distress, and good corporate governance on audit delay. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 72-82
- Sugiyanto, S., & Febrianti, F. D. (2021). The effect of green intellectual capital, conservatism, earning management, to future stock return and its implications on stock return. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 93.
- SUGIYANTO, S. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(1), 82-96.
- Sugiyanto, E. M. (2018). *Earning Management, Risk Profile And Efficient Operation In The Prediction Model Of Banking: Eviden From Indonesia*.
- Syafrizal, S., & Sugiyanto, S. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar Idx 2017-2021). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829-842.
- Wiwit Irawati, Sugiyanto, Luh Nadi 2019 Intellectual Capital dan Program Pendampingan sebagai Pemberdayaan Ekonomi Kreatif UMKM *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic* p-ISSN 2087-8133| e-ISSN : 2528-326X

